ISLAM DAN POLITIK MENURUT PARTAI KEADILAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Theologi Islam

Oleh :

MUCH SULTON

NIM : 95522041

JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2003

NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Januari 2003

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Much Sulton
N I M	:	95522041
Jurusan	:	Perbandingan Agama
Judul Skripsi	:	Islam dan Politik Menurut Partai Keadilan

maka selaku Pembimbing/Pembantu Pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing,	Pembantu Pembimbing
Dr. Siswanto Masruri, MA	Moh. Soehada, S.Sos
N I P: 150216528	N I P : 150291739

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telpon/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN
Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/ 680/2003

Skripsi dengan judul :*Islam dan Politik Menurut Partai Keadilan*

Diajukan Oleh:
1. Nama : Much Sulton
2. NIM : 95522041
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : PA

Telah dimunaqosyahkan pada tanggal 5 Maret 2003 dengan nilai : 2.61 dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Agama strata 1 dalam bidang ilmu Ushuluddin.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Subgyo, M. Ag.
NIP :150234514

Sekretaris Sidang

Drs. Rachmat Fajri
NIP : 150275041

Pembimbing

Dr. Siswanto Masruri, MA.
NIP : 150216528

Pembantu Pembimbing

Moh. Soehadha, S. Sos.
NIP :150291739

Penguji I

Dr. Siswanto Masruri, MA.
NIP : 150216528

Penguji II

Ustadzi Hamzah, S. Ag
NIP : 150298987

Yogyakarta, 16 Juli 2003
DEKAN

Dr. Djam'annuri, MA
Nip: 150182860

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan.

Semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak ilmu yang dituliskan oleh pena-Nya dan dirangkum dalam kitab-Nya. Berkat rahmat Allah SWT yang tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dan atas kekuatan yang tidak dimiliki seseorang kecuali dari-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Islam dan Politik *Menurut Partai Keadilan*". Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan yang bermanfaat dalam keilmuan pada umumnya dan ilmu Perbandingan Agama khususnya. Kalaupun ada kekurangan, dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ushuluddin, beserta seluruh stafnya.
3. Para Dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin.
4. Drs. Siswanto Masruri, MA selaku pembimbing I dan Moh. Soehada, S.Sos selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan supportnya dengan penuh keikhlasan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Staf Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga, Dan Kantor DPW Partaai Keadilan DI Yogyakarta yang telah membantu dan mencarikan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
6. Isteri dan anakku tercinta atas pengertian dan pengorbanannya selama ini.

Semoga bantuan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara di atas mendapat balasan dari Allah SWT. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 21 Januari 2003

Much Sulton

Abstraksi

Skripsi ini berbincang persoalan agama (baca : Islam) dan politik, masalah klasik bukan ? Sebuah masalah yang sebenarnya banyak yang mengkaji. Lebih spesifik, obyek kajian skripsi ini adalah Partai Keadilan; partai yang menurut penyusun yang memberikan nuansa baru dalam jagad perpolitikan kita. Pemilihan obyek kajian yang spesifik inilah, yang merupakan satu dari sekian pembeda dari pembahasan Islam dan politik sebelumnya.

Pemilihan judul tersebut didasarkan atas beberapa argumen; Partai Keadilan merupakan *genre* baru dalam Islam politik, yakni Islam yang berbasis pada kampus; basis Islam kampus ternyata memberikan nuansa yang berbeda dalam artikulasi politik dengan partai yang berbasis Islam lainnya; pembahasan tentang pandangan Islam dan politik Partai Keadilan belum ada yang mengkaji, hingga duplikasi tulisan atau penulisan ulang dapat terhindari. Terjaminlah orisinalitas kajian ini.

Ada dua masalah pokok rumusan masalah yang dijawab dalam penelitian ini; pemikiran Partai Keadilan tentang hubungan Islam dan Politik dan ; implikasi terhadap pandangan dan sikap atau kebijakan politik. Untuk memperjelas, pada rumusan masalah yang pertama, dikaji secara mendalam tentang pemikiran keislaman Partai Keadilan yang menjadi dasar artikulasi politiknya. Pada rumusan yang kedua, diudar berbagai implikasi dari pandangan – yang menggambil tiga pemikiran tentang persoalan politik, yakni negara, demokrasi dan nasionalisme--, dan kebijakan politik – yang mengambil tiga kasus, yakni Asas Tunggal, Piagam Jakarta dan masalah Presiden Perempuan.

Dengan pendekatan intepretatif, penyusun memperoleh jawaban bahwa berangkat dari sebuah keyakinan akan universalitas Islam, bagi Partai Keadilan, Islam dan politik tidak boleh dipisahkan dalam pengertian yang sangat formal. Artinya Islam harus tampil dengan segala atributnya dalam setiap lini kehidupan, termasuk politik. Pandangan universalitas Islam yang menjadi dasar artikulasi politiknya ini, tidak hanya sebuah keyakinan akan adanya paket aturan Islam dalam ranah privat dan publik, lebih dari itu Islam diyakini sebagai satu-satunya nilai kebenaran yang eklusif dengan tuntutan penegakan nilai itu dengan tuntas di segala lini kehidupan. Dengan pemahaman keislaman yang demikian Partai Keadilan menolak pemisahan fungsi agama dan politik sebagaimana disuarakan kaum sekularis. Politik dimaknai sebagai bagian dari dakwah yang bertujuan mengubah masyarakat atau negara menjadi (yang dipandang) Islami.

Pemikiran Islam dan politik dipertajam dengan uraian pandangan Partai Keadilan tentang keterkaitan Islam dan negara; Islam dan demokrasi dan ; Islam dan nasionalisme, yang dilanjutkan kemudian dengan analisa kebijakan politik keagamaan sebagai fakta empiris yang pernah ditampakkan partai ini dalam menyikapi beberapa isu politik nasional.

Satu catatan menarik yang dapat diperoleh, dengan komitmen total terhadap pelaksanaan ajaran Islam membuat corak artilukasi politik Partai Keadilan sedemikian santun. Sebuah artikulasi yang asing bagi dunia perpolitikan kita bukan ?

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN NOTA DINAS..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

HALAMAN MOTO..... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN..... v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAKSI..... viii

DAFTAR ISI..... x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Pokok Masalah..... 9

C. Tujuan dan Kegunaan..... 9

D. Telaah Pustaka..... 10

E. Metode Penelitian..... 11

F. Sistematika Pembahasan..... 12

BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL DAN PEMIKIRAN PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA

A. Kerangka Konseptual..... 14

1. Islam dan Poitik..... 14

a. Islam dan Negara..... 22

b. Islam dan Demokrasi..... 25

c. Islam dan Nasionalisme..... 31

B. Islam dan Partai Politik di Indonesia..... 36

BAB III : PARTAI KEADILAN DAN VISI POLITIK KEAGAMAAN

A. Partai Keadilan : Kristalisasi Kesadaran Politik Aktivis Dakwah Kampus..... 42

B. Islam dalam Prespektif Partai Keadilan..... 48

C. Karakteristik dan Prinsip Dasar Partai Keadilan 51

1. Karakteristik Partai Keadilan..... 51

2. Prinsip Dasar Partai Keadilan..... 53

D. Visi dan Misi Politik Partai Keadilan..... 54

a. Visi Politik Partai Keadilan..... 54

b. Misi Politik Partai Keadilan..... 54

BAB IV. ISLAM DAN POLITIK MENURUT PARTAI KEADILAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PANDANGAN KEBIJAKAN POLITIK PARTAI

A. Relasi Islam dan Politik Menurut Partai Keadilan..... 56

1. Islam dan Politik..... 56

a. Politik Sebagai Manifestasi *Syumuliyah* Islam..... 58

b. Politik Sebagai Bagian Dakwah Islam..... 65

A. Implikasi Konsepsi Islam dan Politik Terhadap Pandangan dan Kebijakan Partai Keadilan..... 68

1. Implikasi Pandangan Politik..... 69

a. Islam dan Negara..... 69

b. Islam dan Demokrasi..... 74

c. Islam dan Nasionalisme..... 78

2. Implikasi Sikap dan Kebijakan Politik..... 80

a. Sikap dan Kebijakan Politik Partai Keadilan Terhadap Asas Tunggal : Langkah Pertama Penegakan Syarikat Islam..... 80

b. Sikap dan Kebijakan Politik Partai Keadilan Terhadap Piagam Jakarta : Penegakan Syari'at Islam Lewat Konstituti..... 83

c. Penolakan Presiden Perempuan : Memperjuangkan Demokrasi "ala" Tuhan 88

C. Catatan Kritis : Politik " Membela Tuhan "..... 90

BAB V. PENUTUP

a. Kesimpulan..... 95

b. Saran.Saran..... 96

Daftar Pustaka..... 97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama, menurut Supardi Suparlan, dipandang sebagai sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi respon terhadap apa saja yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang ghaib dan suci.[1] E.B Tylor mengemukakan "definisi minimum" tentang agama yakni sebagai kepercayaan terhadap adanya wujud-wujud spiritual. Sementara menurut A. Radcliffe-Brown agama merupakan ekspresi dari suatu bentuk ketergantungan pada kekuatan di luar diri kita sendiri, yaitu kekuatan spiritual atau moral.[2]

Perubahan radikal dalam memandang agama terjadi setelah adanya pencerahan di Eropa Barat dan ketika pemikiran rasional telah menjadi azas kehidupan intelektual. Kaum cendekiawan Barat menganggap bahwa harus ada pemisahan tegas antara agama dan negara.[3] Kaum cendekiawan Barat berpendapat bahwa negara harus menjamin keadilan semua golongan. Agama

---

[1] Parsudi Suparlan, "kata pengantar", dalam Roland Roberston , (Ed), *Agama dalam analisa dan interpretasi sosiolog,* (Jakarta : Rajawali pers, 1989), hlm v-vi

[2] Sebagaimana dikutip Betty R. Schart, *Kajian sosiologi Agama* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1995), hlm.30

[3] Lihat, Sayidiman Suryohadiprojo *Tempat Agama dalam Negara Modern* dalam *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesai* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999) hlm.75

hanya dipandang tidak berbeda dari perkumpulan dan organisasi swasta lainnya yang diperlakukan sama di hadapan negara.[4]

Pemikiran tersebut juga dilatarbelakangi oleh persepsi mereka tentang agama. Agama mereka pahami sebagai urusan privat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan tidak mempunyai kaitan dengan sisi sosial manusia. Dalam *The Social Science Encyclopedia* misalnya, disebutkan bahwa agama (*religion*) sama dengan ritual.[5]

Definisi agama *(religion)* versi Barat hanya memperlihatkan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, akibatnya diskursus agama dan politik di Barat kurang mendapat perhatian karena kedudukan agama dan negara sudah jelas. Teori yang lahir terhadap kajian agama dengan sendirinya adalah teori sekuler.

Berbeda dengan itu, Islam mempunyai karakteristik yang berbeda dengan agama lain ketika berbicara masalah politik. Agama yang berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti "tidak kacau", dalam kamus Barat hanya berarti hubungan vertikal manusia dengan Tuhan dan tidak berhubungan dengan aspek kehidupan manusia. Inilah yang melahirkan negara sekuler, berbeda dengan Islam.

Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang bersifat holistik. Islam adalah totalitas padu yang menawarkan pemecahan semua masalah kehidupan. Pandangan ini meyakini bahwa Islam "hadir di mana-mana", sebuah pandangan yang mengakui kehadiran Islam yang selalu memberikan panduan

---

[4] Franz Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : Gramedia, 1994) hlm.356.

[5] Sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara.* Hlm. dari Adam Kuper dan Jessica Kuper (ed), *The Social Science Enclyclopedy* (London, Boston, and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1985), hlm.689-700

moral yang benar bagi segala tindakan manusia. Islam merupakan ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama dan lingkungan sekitarnya. Di dalam agama Islam ada ajaran yang mengatakan bahwa Islam adalah *Rahmah li al-'Alamin,* ini berarti bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Derivasi ajaran ini menimbulkan keyakinan bahwa Islam adalah seperangkat ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik masalah politik, ekonomi, budaya dan lain-lain.

Namun pada tingkatan praksis, bagaimana sifat holistik Islam tersebut harus diaplikasikan, umat Islam tidak memiliki satu pemahaman yang sama. Ada kecenderungan umat Islam untuk memahami sifat holistik Islam secara organik, artinya hubungan Islam dengan aspek kehidupan harus dalam bentuk yang legal dan formal, ada juga yang melihat totalitas Islam tersebut dalam dimensinya yang lebih subtantif.

Kecenderungan pemahaman yang berbeda membawa implikasi lebih lanjut pada berbedanya pandangan dan sikap politik umat Islam. Kecenderungan pemahaman ajaran Islam secara formal akan menampilkan sikap politik yang ekslusif dan terkesan "ideologis". Akibatnya mereka lebih mengedepankan dan memperjuangkan tampilan Islam secara legal-formal dalam kehidupan politik dan negara.

Berbeda dengan pandangan pertama, golongan Islam yang lebih mengedepankan subtansi dan lebih mementingkan isi dari pada bentuk, berpandangan bahwa negara maupun sistem politik hanyalah alat untuk menuju sesuatu yang lebih substansial yaitu mewujudkan tatanan negara yang menjamin

prinsip-prinsip dasar yang hakiki yakni, keadilan, kebebasan, kesetaraan derajat dan persaudaraan, dengan tanpa mempertimbangkan bentuk suatu negara. Islam diyakini tidak memiliki ajaran tentang sistem negara. Islam tidak pernah menyebutkan soal negara ideal, Islam bisa menjadi besar kalau tidak menampilkan wajah politik melainkan wajah moralnya. Atau dengan kata lain, Islam mengutamakan politik sebagai moralitas, bukan sebagai institusi. [6]

Dalam wacana politik Islam kita mengenal tiga paradigma relasi hubungan Islam dan negara[7]. *Pertama* , Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara, atau disebut paradigma integralistik. Menurut paradigma ini negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus (*ad-Din wa ad-Daulah).* Salah satu tokoh dari penganut aliran ini adalah al-Maududi [8] yang, menurut Munawir Sjadzali, dalam pemikiran politiknya mempunyai tiga dasar keyakinan (gagasan) pokok. Ketiga pokok gagasan tersebut adalah, *pertama,* Islam adalah agama paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur kehidupan. *Kedua,* Kedaulatan tertinggi ada di kekuasaan Allah. Dan yang *ketiga,* Sistem politik Islam tidak mengenal batas-batas geografis, bahasa dan kebangsaan.[9]

---

[6] Abdurrahman Wahid, *Islam sebagai Moral Bukan Institusi,* dalam Jurnal PrismaNo. 2-1995, hlm.67

[7] Lihat, Din Syamsuddin,*Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikran Politik Islam,* dimuat dalam Jurnal Ulumur Qur'an No.2 Vol.IV, th.1993 hlm. 5

[8] Lahir di India 25 September 1903 dan meninggal 23 September 1979, bernama lengkap Abu al-A'la Al-Maududi. Adalah pendiri *jamiah Islami* yang menuntut di bentuknya negara Islam di Pakistan dengan konstitusidan sistem hukum Islam.

[9] Lihat, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta :UI Press, 1993) hlm.166

Oleh karena itu, bagi al-Maududi, syari'ah (hukum Islam) tidak mengenal pemisahan agama dan politik atau agama dan negara. Syari'ah adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Al-Maududi juga berpendapat, negara harus didasarkan pada empat prinsip dasar yaitu, ia harus mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui otoritas Nabi Muhammad yang berstatus wakil Tuhan, dan menerapkan musyawarah. Jadi, negara menurut Maududi berfungsi sebagai kendaraan politik untuk menjalankan hukum-hukum Tuhan. Negara harus tunduk pada aturan-aturan Tuhan yang telah tercantum di dalam al-Qur'an dan al-Al-Hadis. Pengaruh pemikiran al-Maududi sangat bergema di seluruh dunia Islam, bahkan cendekiawan Muslim Indonesia seperti Amin Rais pun sedikit banyak dipengaruhi oleh gagasan dan sikapnya.[10] Pola hubungan agama dan negara yang bersifat formal tersebut pernah diperjuangkan oleh Natsir dan kawan-kawan dari golongan Nasionalisme Muslim dalam sidang-sidang BPUPKI dan Konstituante, walaupun pada akhirnya perjuangan tersebut gagal.

Paradigma *kedua* memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Negara ditempatkan sebagai sarana penunjang perkembangan agama. Dan agama diposisikan sebagai pembimbing etika dan moral suatu negara. Pandangan simbiosa agama dan negara dapat diketemukan dalam pemikiran beberapa tokoh

---

[10] Lihat, Ma'mun Murod Al-Brebessy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais Tentang Agama danNegara* (Jakarta : Rajawali, 1999) hlm.140

Islam, misalnya Al-Mawardi.[11] Menurut al-Mawardi, kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi Kenabian yakni memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua aktifitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik.

Paradigma *ketiga* bersifat sekularistik yang menolak pendasaran negara pada Islam. Salah satu pelopor paradigma ini adalah Ali Abdur Raziq [12], seorang cendekiawan Muslim dari Mesir. Menurut pendapatnya, Islam tidak mempunyai kaitan apapun terhadap sistem pemerintahan, termasuk *al-Khulafa ar-Rasyidun* menurutnya merupakan sistem yang duniawi yang terlepas dari ajaran Islam. Islam menurutnya, tidak memberikan petunjuk suatu sistem politik (bentuk negara) yang ideal untuk didirikan umat Islam. Menurut Raziq, Islam merupakan entitas keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan komunitas keagamaan yang tunggal, berdasarkan kesamaan keyakinan dan tidak mengajarkan/menganjurkan pembentukan negara (sistem pemerintahan) tertentu. Kekuasan politik (negara) bukan karena tuntutan agama melainkan tuntutan sosial dan politik itu sendiri.

Thesis pokok Ali Abdul ar-Raziq ada tiga hal. *Pertama,* sistem khalifah ditolak. *Kedua,* Islam perlu adanya pemerintahan, pemerintahan ini diterapkan berdasarkan akal, bukan berdasarkan agama. *Ketiga,* pemerintahan itu bukan

---

[11] bernama lengkap Abu Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi al-Bishri (354 H-450H). Dia pemikir Islam ternama, karya-karya di bidang politik antara lain, *Al-ahkam as-Sultaniyah* (Peraturan-peraturan pemerintahan) dan *Qawainin al-Wuzarah, Siyasah al-Malik* (Ketentuan-ketentuan Kewaziran, Politik Raja)

[12] Lahir pada 1888 dan meninggal 1966, Beliau seorang intelektual Mesir (baca: Al-Azhar) yang menjadi murid Muhammad Abduh. Salah karya yang beliau tulis adalah *Islam wa Usul Al-Ahkam,* sebuah buku konttroversial yang membuat beliau diusir dari mesir.

target politik tertentu. Disinilah isu agama dimainkan demi kepentingan penguasa orde baru masa itu.

Dinamika perbincangan agama dan negara juga melanda partai-partai di Indonesia. Sejak dilengserkannya Suharto, gema reformasi dan aroma kekebasan merebak dalam masyarakat. Tuntutan perubahan disegala sektor kehidupan didesakan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pada masa reformasi ini kembali banyak muncul partai-partai politik sebagaimana ditahun 1955.

Partai-partai yang muncul diantaranya dengan membawa agama sebagai asas politiknya, seperti PPP, PK, PBB dll. Dalam skripsi ini berikut akan difokuskan dalam membahas pandangan dan sikap politik Partai Keadilan kaitannya dengan pemahaman keagamaan mereka.

Partai ini yang sering dikatakan berbasis "Islam kampus" merupakan *genre* baru dalam percaturan politik Islam di Indonesia. Yang menarik dari partai ini disamping terlepas dari sejarah partai politik tahun 1955, ia merupakan partai yang mempunyai warna berbeda dari partai-partai Islam yang lain. Dominasi intelektual kampus dari disiplin ilmu yang berbeda yang mayoritas menjadi para aktifis partai ini seakan mengingatkan kita pada gerakan baru Islam yang menggeliat di kampus-kampus "sekuler" seperti di ITB pada tahun 1970-an. PK sepertinya merupakan kristalisasi dari gerakan-gerakan Islam kampus tersebut yang berada pada sayap politik. Walhasil, menurut penyusun adalah menarik untuk dikaji tentang pandangan-pandangan dan sikap partai Keadilan ini yang *nota bene* menjadi warna baru dalam kancah perpolitikan Islam Indonesia.

B. Pokok Masalah

Skripsi ini difokuskan membicarakan pada pandangan dan sikap politik partai keadilan. Oleh karena itu pertanyaan yang diajukan sebagai rumusan masalah dalam skripsi ini sebagaimana berikut :

a. Bagaimana pandangan Partai Keadilan tentang hubungan agama dan politik ?

b. Apa implikasinya terhadap pandangan dan kebijakan partai keadilan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk :

a. Menjelaskan pandangan partai keadilan mengenai hubungan agama dan politik.

b. Menjelaskan implikasinya terhadap sikap dan kebijakan politik partai keadilan

2. Kegunaan

Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah memperkaya khazanah pengkajian pemikiran politik Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Persoalan politik Islam di Indonesia telah banyak penelitian yang dilakukan baik oleh peneliti dalam maupun luar negeri. Seperti yang dilakukan oleh Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara; Transformasi pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, yang membincangkan persoalan perkembangan dan pergeseran pemikiran Islam politik di Indonesia. Dalam penelitian ini Bachtiar Effendi melacak akar dan memetakan pemikiran Islam politik di Indonesia.

Lain dengan Bachtiar effendi, Faisal Ismail dalam bukunya *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama : Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, lebih menitik beratkan pada perbincangan respon umat Islam ketika menerima azas tunggal (Pancasila).Kemudian M. Syafi'i Ma'arif dalam bukunya *Islam dan Masalah Kenegaraan : Studi tentang percaturan dalam konstituante"*, menfokuskan pembahasan mengenai peran dan persoalan umat Islam diseputar sidang. Konstituante. Abd. Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, mengkhususkan pembahasan dari dinamika hubungan dan sikap negara dengan Islam pada masa Orde Baru.

Untuk menyebut hasil penelitian dari luar negeri seperti yang dilakukan Robert W Hefner, *Civil Islam*, yang lebih bercorak antropologis dalam meneliti persoalan Islam politik di Indonesia. Adapun pembahasan mengenai masalah yang mendalam dengan mencoba lebih mendalam meneliti struktur dalam dari salah satu mesin politik (partai politik) di Indonesia belum banyak dilakukan, khususnya yang mengkhususkan pada pengaruh motif keagamaan dengan sikap politik sebuah partai.

Di IAIN baru Ahmad Baehaqi yang meneliti pandanga Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Nasionalisme. Sedang untuk PK sendiri sepengetahuan penyusun belum pernah dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan berkaitan dengan studi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Maka dari itu tekhnik yang digunakan adalah pengumpulan data literatur, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah *deskriptif*, yakni penelitian ini ditekankan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Hanya saja untuk memberikan manfaat yang lebih luas, kerapkali di samping mengungkapkan fakta sebagaimana adanya dilakukan juga pemberian interpretasi yang memadai.[17]

3. Analisis data

Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen deduksi dan induksi. Deduksi adalah proses penarikan

---

[17] Fuad Zein, *Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah*, makalah materi kuliah

kesimpulan yang bersifat individual dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.[18]

Sedang induksi adalah cara pengambilan keputusan dimana kita menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus individual.[19]

4. Pendekatan

Selanjutnya penyusun menggunakan pendekatan sejarah pemikiran. Pendekatan sejarah pemikiran sebagaimana diterangkan oleh Crane Branton adalah untuk mencari kembali dan meneliti hubungan antara ide demikian pada satu fihak dan pada fihak lain "kecenderungan" (*drives*), dan "kepentingan" (*interest*) serta faktor-faktor non-intelektual pada umumnya dalam sosiologi perorangan dan masyarakat.[20]

G. Sistematika Pembahasan

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka konseptual dan pemikiran partai politik islam di indonesia

---

[18] Jujun S. Suriasumantri, *Tentang Hakekat Ilmu : Sebuah Pengantar Redaksi*, dalam, Jujun Suriasumantri (penyunting) *Ilmu dalam Prespektif; Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 21

[19] *Ibid*

[20] Crane Branton, *Sejarah Intelektual*, dalam, Taufiq Abdullah & Abdurrahman Surjontiharjo (redaksi), *Ilmu Sejarah dan Historiografis; Arah dan Prespektif*, (Jakarta: Gramedia 1995), hlm.201

Bab III memaparkan profil partai keadilan beserta konteks sejarah yang mengiringi dan pandangan-pandangan Keislaman dan suprastruktur organnya.

Bab IV. Pada bab ini berisi analisa tentang pandangan partai keadilan tentang hubungan agama dan politik serta menjelaskan implikasinya terhadap pandangan dan kebijakan politiknya.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Partai Keadilan memandang tidak ada pemisahan antara Islam dan politik. Islam diyakini mempunyai watak *syumul* (integral) yang mengatur semua aspek kehidupan di bumi, termasuk politik. Kemudian politik dimaknai sebagai bentuk lain dari aktifitas dakwah untuk menegakkan aturan Allah di bumi.

Pandangan seperti itu mempunyai Implikasi konseptual dari gagasan itu dalam memandang persoalan hubungan Islam dengan Negara, Demokrasi dan nasionalisme serta implikasi kebijakan politik sebagaimana berikut :

a. Hubungan Islam dan negara bersifat integralistik. Negara dimaknai sebagai medan makna nilai yang harus direbut untuk mendidik masyarakat demi tegaknya nilai-nilai Islam.
b. Hubungan demokrasi dan Islam bersifat korektif. Artinya demokrasi tidak selamanya sesuai dengan Islam. Konsep yang mendasari ini adalah doktrin *al-hakimiyah* yang memandang Tuhan pemegang segala otoritas dan kuasa.
c. Nasionalisme dalam pandangan Partai Keadilan adalah nasionalisme yang menempatkan Islam sebagai pengarah cita-cita. Dari pandangan-pandangan tersebut berimplikasi terhadap sikap politik seperti , ditolaknya asas tunggal sebagai langkah pertama untuk penegakan syari'at Islam di Indonesia. Kemudian berusaha

memasukkan Piagam Jakarta sebagai bentuk nyata perjuangan konstitusional penegakan syari'ah Islam, dan yang terakhir sebagai praktik penolakan pemaknaan demokrasi yang sekuler Partai Keadilan menolak presiden perempuan yang diabsahkan oleh demokrasi sekuler dan ditolak demokrasi "ala" Tuahan.

B. SARAN-SARAN

Dari penelitian ini penyusun memberikan rekomendasi saran :

1. Perlunya satu kajian yang komprehensip tentang persoalan Islam dan politik agar ditemukan satu formulasi hubungan yang benar-benar simbiotik mutualis dengan tidak mengorbankan keislaman dan keindonesiaan.
2. Perlunya ditindak lanjuti satu eksplorasi yang mendalam tentang sumbangan agama dalam konteks berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 1980

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Abdilah, Masykuri, *Islam and Nation state*, Makalah disampaikan dalam Seminar Internasional tentang Islam dan Humanisme, diselenggarakan oleh IAIN Walisongo Semarang, tanggal 6-8 Oktober 2000 di Semarang

Abdullah, Taufiq & Abdurrahman Surjontiharjo (red.), *Ilmu Sejarah dan Historiografis; Arah dan Prespektif*, Jakarta: Gramedia, 1995.

Alfian (edt), *Persepsi Politik Tentang Kebudayaan, Kumpulan Karangan*, Jakarta: Gramedia, 1985

Anshari, Endang Saifuddi, *Piagam Jakarta 25 juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islam Dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Republik Indonesia 1945-1959*, Jakarta: Rajawali, 1985

Anshari, Isa, *Islam dan Nasionalisme*, Bandung: Pustaka Jihad, tt.

Apter, David E., *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: LP3ES, 1985

Balda, Syamsul, Abu Ridha dan Untung Wahono, *Politik Da'wah Partai Keadilan*, Jakarta: DPP PK, 2000

Batt, Chetan, *Hindu Nationalism: Origin, Ideologis and Modern Myths*, New York & Oxford: Berg, 2001

Branton, Crane, *Sejarah Intelektual*, dalam, Taufiq Abdullah & Abdurrahman Surjontiharjo (redaksi), *Ilmu Sejarah dan Historiografis; Arah dan Prespektif*, Jakarta: Gramedia 1995

Al-Brebessy, Ma'mun Murod, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais tentang Agama dan Negara* Jakarta: Rajawali, 1999

Budiman, Arief, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997

Cruoch, Harorld, *Masyarakat, Politik dan Perubahan I*, Jakarta: Pusat Studi Politik Indonesia, 1978

Dahl, Robert A., *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor, 1992

Enayat, Hamid, *Modern Islamic Political Thought : Response of the Syi'I and Sunni Muslims to the Twentieth Century*, Texas: Texas University, 1981

Effendy, Bachtiar, *Islam dan Negara: TransformasiPemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998

Fakih, Mansur dkk, *Panduan Pendidikan Politik Untuk rakyat*, Yogyakarta: insist, 1999

Gibb, H. A. R., *Whiter Islam?: A Survey of Modern Movement in the Moslem World*, London: Victor Gollanez, 1932

Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983

Geertz, Clifford, *MojokutoDinamika Sosial Sebuah Kota Kecil*, Jakarta: Grafiti, 1986

Hafidhudin, Didin, *Beberapa Paradigma Perubahan Indonesia*, makalah dipresentasikan pada acara "Orasi Politik dan Dialog" bersama calon Presiden RI ke-4 di Graha Sabha Pramana Universitas Gajah Mada, ahad 25 April 1999

Hakim, Ahmad Atho' Lukman, *Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia*, dimuat dalam Jurnal Isip Vol.2 No.15, edisi Desember 2000-januari 2001

Hakim, Ahmad Atho'Lukman, *Doktrin Al-Hakimiyah: Akar Kekerasan Fundamentalisme Islam*, makalah disampaikan dalam diskusi terbatas PW IPNU-IPPNU DIY, 30 November 2002 di gedung GMNU sudagaran Yogayakarta

Haricahyono, Cheppy, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986

Hatta, M., *Serba-serbi Pancasila; Perkembangan Faham Pancasila* dimuat di majalah Mawas Diri tahun 1980

Hidayat, Komaruddin, "Agama dan Demokrasi", dalam *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1998

Iskandar, A. Muhaimin, *PKB: Politik Rahmatan lil Alamin*, dalam, Sahar L. Hasan, Kuat Sukardiyono dan Dadi M.H Basri (edt), *Memilih Partai Islam, Visi, Misi dan Persepsi*, Jakarta: GIP, 1998

Isma'il, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999

Ismail, Nur Mahmudi, "Jati Diri Partai Keadilan" dalam, *memilih Partai Islam*, dalam, *Memilih Partai Islam, Visi, Misi, dan Persepsi*, Sahar L. Hasan dkk (edt), Jakarta: Gema Insani Press, 1998

Al-Jabiri, Muhammad Abid, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, Mujiburrrahman (pent), Yogyakarta: Fajar Pustakan, 2001

Jurnal Ulumul Qur'an, Nomor 3, Vol.IV, th. 1993

Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesiatera, 2001

Kuntowijoyo, "Enam Alasan Untuk Tidak Mendirikan Parpol Islam", dalam, *Memilih Partai Islam, Visi, Misi, dan Persepsi*, Sahar L. Hasan dkk (edt), Jakarta : Gema Insani Press, 1998

Liddle, William dan Saiful Mujani, Islam, Kultur Politik dan Demokratisasi", *demokrasi dan HAM*, vol.1 Mei –Agusutus, 2000

Ma'arif, M. Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang percaturan dalam konstituante"*, Jakarta: LP3ES, 1985

Madjid, Nurcholis, "Cita-cita Politik Kita" dalam, Bosco carvalo & Dasrizal (penyunting) *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: LEPPENAS, 1983

Madjid, Nurcholis, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, cet XI, Bandung: Mizan,1998

Mortimer, Edward, *Faith and Power; The Policies of Islam*, New York: Rondom House, 1982

al-Nahwi, Adnan Ali Rida, *al-Syura la al-Dimuqratiyyah*, Kairo: Dar al-Sahwa, 1985

Natsir, Muhammad, *Ikhtaru Ihda al-Sabilain: al-Din au La Diniyah*, (Ttp: *Mansyurat al-Asri al-Hadist*, 1972

Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, Cet.VII 1995

Raharjo, Dawam, *Basis Sosial Pemikiran Islam di Indonesia Sejak Orde Baru*, dalam Jurnal Prisma No. 3 th. XX Maret 1994

Al-Raziq, Ali Abdul, *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985

Schart, Betty R., *Kajian Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UII Press, 1993

Soekarno, *Kebangsaan dalam Pancasila*, dalam H.A.Notosoetardjo (Penyusun) *Dokumenta Pantjasila Berdasarkan Adjaran Bung Karno*, Jakarta: Penerbit Endang, 1965

Soekarno, *Saya Kurang Dinamis*, dalam *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1964

Sudiarja, A., "Indonesia : Negara Sudah Lahir, Bangsa Belum terbentuk?", *Jurnal BASIS*, no. 03-04, tahun ke 50, Maret-April 2001

Suparlan, Parsudi, "kata pengantar", dalam Roland Roberston, (Ed), *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiolog*, Jakarta: Rajawali pers, 1989

Suryohadiprojo, Sayidiman, *Tempat Agama dalam Negara Modern* dalam *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999

Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1994

Syamsuddin, Din, *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, dimuat dalam Jurnal Ulumur Qur'an No.2 Vol.IV, th.1993

Tafsir, Ahmad, pengantar dalam, Ali Abdul Al-Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985

Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Wahid, Abdurrahman, *Islam sebagai Moral Bukan Institusi*, dalam Jurnal Prisma No. 2-1995

Yamin, Moh., *Tentang Dasar Negara Dalam Konstituante I*, Bandung: Konstituante Republik Indonesia, 1958

Zein, Fuad, *Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah,* makalah materi kuliah fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga

DPW PK DIY, *Mengapa Kita Berpolitik, Leaflet* yang diterbitkan DPW PK DIY

Arsip DPW Partai Keadilan DIY, *Platform Partai Keadilan.*

Rekomendasi Dewan Syari'ah tentang Jama'ah dan Partai dalam hasil kajian Dewan Syari'ah Partai Keadilan (fatawa, Keputusan, Rekomendasi, Panduan dan Seruan). Hasil Munas I Paaartai Keadilan 18-21 Mei 2000 di Hotel Bumi Wiyata Depok Jawa Barat.

Tinjauan Syari'I Da'awi dan Siasi Pendirian Partai Keadilan, Arsip DPW Partai Keadilan Yogyakarta.

DPW PK DIY, *Syumuliyatul Islam : Memperjuangkan Islam sebagai system Kehidupan, Materi TOP(Training Orientasi Partai) Nasional,* tidak diterbitkan

DPP PK, *Sekilas Partai Keadilan,* Jakarta: DPP PK, 1998